



Implementasi E-Government Pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang Di Kabupaten Tangerang

Salman Alfirisi ¹, Nanan Sujana ², Muhammad Ibrahim Rantau ³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Abstrak

Received: 04 Januari 2024
Revised : 11 Januari 2024
Accepted: 18 Januari 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana Implementasi E-Government Pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradigma post positivism. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan e-government pada layanan informasi publik melalui aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang pada indikator komunikasi dan disposisi sudah menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori indikator implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), sedangkan pada indikator sumberdaya dan stuktur birokrasi menunjukkan hasil yang belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan pada dua indikator tersebut.

Keywords: *E-Government, Layanan Informasi, Tangerang Gemilang*

(*) Corresponding Author: bayusalman3@gmail.com

How to Cite: Alfirisi, S., Sujana, N., & Rantau, M. I. (2024). Implementasi E-Government Pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang Di Kabupaten Tangerang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10533303>

PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi Informasi sebagai bagian dari Globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah membawa tuntutan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Kaitannya dalam perwujudan pelayanan informasi publik adalah pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal.

Pada konteks demokrasi, layanan informasi publik merupakan bagian dari transparansi badan publik atau institusi penyelenggara negara kepada masyarakat melalui manajemen jaringan organisasi. Artinya, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan institusi publik. Bentuk keterlibatan masyarakat di antaranya kemudahan akses informasi yang diberikan oleh badan publik, sehingga masyarakat bisa melihat, menganalisa, sekaligus mendeteksi dan mengoreksi kekeliruan atas informasi yang disampaikan oleh badan publik. Keterbukaan informasi pada instansi pemerintah

merupakan gagasan dari pentingnya pemerintah melayani masyarakat dengan transparan.

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008. tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut telah mengamanahkan bagi setiap pemerintah daerah sebagai badan publik sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebaagian atau seluruh dananya brsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Kebijakan *E-Government* di Indonesia diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Gagasan pengembangan *E-Government* di Indonesia ini adalah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih terbuka, tidak kaku secara birokratis. Sehingga bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini mengandung dua unsur pokok, yaitu: (1). Perlunya instansi pemerintah untuk mengembangkan pelayanan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai basis pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat; (2). Pertimbangan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengakses pelayanan publik dengan lebih cepat, murah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan

Perkembangan sistem *E-Government* di Indonesia secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas hal ini belum memadai. Untuk lebih meningkatkan pengembangan *E-Government* di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan *E-Government* terutama dari segi Infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun kepada masyarakat. Bila dilakukan dengan serius hal tersebut dapat mendukung tercapainya keberhasilan implementasi *E-Government* dan mampu memperbaiki mutu pelayanan publik demi terciptanya *clean and good governance* di Indonesia.

Jenis Layanan *E-Government* tersedianya berbagai macam layanan untuk aplikasi *E-Government* . Tetapi secara umum menurut Indrajit (2005) jenis layanan *E-Government* dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, antara lain : Jenis layanan yang bertujuan untuk penyediaan informasi seperti visi dan misi pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan, prosedur pendirian usaha, berbagai data kependudukan, pertanian dan perdagangan. Untuk jenis layanan yang pertama ini, pembangunan aplikasi *E-Government* sangat bertumpu pada penciptaan halaman Web yang menarik dan komunikatif, Jenis layanan yang bersifat komunikasi interaktif dua arah, seperti konsultasi perpajakan, diskusi tentang rancangan undang-undang dan lain sebagainya. Untuk jenis layanan ini, maka aplikasi *E-Government* perlu kelengkapan fasilitas seperti video konferensi, atau aplikasi *chatting* dan email. Dan jenis layanan yang bersifat transaksi, seperti permohonan

KTP, IMB, pembayaran wajib pajak, listrik, PBB, air, telepon secara *online*, sistem *E-Procurement*.

Secara ringkas tujuan *E-Government* adalah untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, swasta, dan pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, dan layanan. *E-Government* sebagai konsep pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu pertama, persiapan; kedua, pematangan; ketiga, pemantapan; dan keempat, pemanfaatan. Pengaplikasian sistem *E-Government* diharapkan mampu untuk mengupgrade sistem pemerintahan berjalan menuju kearah yang semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas.

Sedangkan pengertian *E-Government* menurut Kementrian Kominfo yaitu sabagai aplikasi Teknologi Informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara *online*. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan publik berbasis digital sedang menjadi *trend* bagi pemerintah pusat bahkan hingga pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan informasi publik terbaik bagi masyarakat. Daerah yang sudah melakukan pelayanan publik berbasis digital salah satunya adalah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang mengeluarkan Aplikasi Tangerang Gemilang dalam memberikan layanan informasi publik. Hal ini merupakan upaya positif bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang setempat bagi memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik adalah memanfaatkan aplikasi sebagai instrumen untuk memenuhi aspek dan prosedur yang cepat, mudah, murah, dan bertanggung jawab. Sehingga, pada setiap badan publik dapat diatur tidak saja mekanisme dan prosedur bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara konvensional, seperti datang ke kantor badan publik yang dituju, mengisi formulir permintaan informasi, diproses oleh petugas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Tangerang Gemilang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menghubungkan, memonitor, menganalisa dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam Kabupaten agar dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien. Aplikasi Tangerang Gemilang adalah bagian dari inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, pelaporan, dan pengaduan dari warga, organisasi, dan instansi pemerintah. Aplikasi Layanan Publik Tangerang Gemilang menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk mendorong kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Dengan begitu, maka pelayanan kepada warga akan lebih maksimal. Beberapa poin yang menjadi tujuan utama ialah meningkatkan efektifitas penanganan informasi yang terjadi di masyarakat sehingga tepat sasaran, melakukan analisa dengan detail bagi informasi pengaduan yang berasal dari sistem aplikasi Tangerang Gemilang dan milik Pemkab Tangerang. Menentukan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kendala berdasarkan sistem Tangerang

Gemilang. Meningkatkan evaluasi berkala terhadap hasil yang telah dicapai serta penanganan suatu masalah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang, aplikasi Layanan Publik Tangerang Gemilang menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk mendorong kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Diskominfo Kabupaten Tangerang menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam penggunaan Aplikasi Tangerang Gemilang terdapat beberapa kendala dan permasalahan diantaranya fitur dan layanan pada Aplikasi Tangerang Gemilang yang belum lengkap dan maksimal. Aplikasi Tangerang Gemilang hanya memuat beberapa fitur menu serta memuat berita kewilayahan saja. Sehingga pelayanan publik berbasis *e-government* pada layanan Aplikasi Tangerang Gemilang ini dinilai belum maksimal. Layanan informasi publik hanya disampaikan melalui berita-berita terkait dengan kewilayahan saja. Seharusnya pada aplikasi tersebut juga memuat semua program kerja dan realisasi program kerja dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.

Selain belum maksimalnya dari pihak pemerintah dalam mengembangkan aplikasi layanan publik Tangerang Gemilang, dari pihak eksternal masyarakat pun banyak yang masih belum menggunakan aplikasi layanan tersebut. Fitur yang belum lengkap ini kemudian juga menjadi sebuah permasalahan yang menghasilkan dampak penggunaan Aplikasi Tangerang Gemilang ini masih rendah. Masyarakat di Kabupaten Tangerang cenderung menggunakan teknologi digital hanya untuk sosial media saja sehingga untuk layanan publik berbasis digital ini masih jarang untuk digunakan.

Menurut Kurniawan (2006) menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah masih terkendala dalam aspek-aspek berikut ini, *E-Leadership* prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Infrastruktur Jaringan Informasi: kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses, Pengelolaan Informasi kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, Lingkungan Bisnis kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Didalam lain sisi, Kurniawan (2006) juga menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah kelemahan pembentukan aplikasi pelayanan publik di Indonesia, antara lain, Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintah, Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan aplikasi, Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapatkan

perhatian, Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

Penelitian lain Tsoraya, dkk (2023) menunjukan di daerah pemerintah Kabupaten Tangerang masih banyak hal-hal yang harus dikaji ulang seperti masih adanya aplikasi dari OPD yang belum terintegrasi dengan baik dan hanya bersifat informasi saja bahwa ada aplikasi dinas terkait di dalam aplikasi Tangerang Gemilang. Selain belum maksimalnya dari pihak pemerintah dalam mengembangkan aplikasi layanan publik, dari pihak eksternal masyarakat pun banyak yang masih belum mengetahui dengan aplikasi layanan tersebut, hal ini dimungkinkan karena masih banyaknya masyarakat kabupaten tangerang yang belum mahir menggunakan teknologi, padahal jika masyarakat sudah mengetahui pelayanan berbasis elektronik ini banyak sekali manfaat yang didapatkan dari adanya aplikasi tersebut dilihat dari fitur layanan aplikasi Tangerang Gemilang.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas yang membuat penulis merasa perlu untuk diteliti sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi *E-Government* Pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang.”

METODE

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kominfo dan masyarakat Kabupaten Tangerang dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yang dipilih peneliti ini sebagai fungsi dalam mempelajari sikap atau sesuai yang ada di lapangan terhadap fenomena yang terkait dengan Implementasi *E-Government* Pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang serta hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data menyelesaikan penelitian tersebut. Sedangkan yang menjadi teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang dikutip Denzim (2012: 592) yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam menganalisis data hasil penelitian dengan model Miles dan Huberman dimulai dengan mereduksi data penelitian (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan yang terdiri dari penarikan/verifikasi (*conclusiondrawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *e-government* pada layanan informasi publik melalui aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang diimplementasikan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-government* pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang ini menggunakan teori indikator implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut hasil penelitian yang berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Edward III dalam Subarsono, 2011: 90-92).

Pertama, pada indikator komunikasi menunjukkan hasil dalam kategori baik. Hal ini dilihat dari komunikasi yang terjalin oleh Diskominfo Kabupaten Tangerang kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi terkait dengan layanan informasi publik Tangerang Gemilang serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang berita *update* wilayah Kabupaten Tangerang melalui aplikasi Tangerang Gemilang.

Kedua, pada indikator sumberdaya menunjukkan hasil belum maksimal. Hal ini dilihat dari keterbatasan masyarakat Kabupaten Tangerang dalam mengakses internet dan teknologi digital, latar belakang pendidikan masyarakat yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan penggunaan teknologi digital khususnya bagi masyarakat desa. Serta pemanfaatan teknologi digital yang kurang cermat sehingga masyarakat di Kabupaten Tangerang ini cenderung menggunakan teknologi hanya untuk media sosial.

Ketiga, pada indikator disposisi menunjukkan disposisi yang baik hal ini terlihat dalam hal surat menyurat bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Tangerang Gemilang sehingga memberikan efisiensi waktu dan tenaga bagi masyarakat. Layanan berbasis digital ini mengurangi adanya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang lekat pada layanan publik di Indonesia.

Keempat, pada indikator stuktur birokrasi menunjukkan hasil belum optimal. Hal ini dilihat dari belum lengkapnya fitur pada aplikasi Tangerang Gemilang yang belum memuat semua jenis layanan publik. Sehingga pada unsur stuktur birokrasi ini dirasakan belum maksimal hal ini dikarenakan masyarakat harus tetap datang ke kantor untuk melakukan pelayanan publik. sedangkan tujuan dari adanya reformasi pelayanan publik yaitu memudahkan masyarakat, menghemat waktu dan tenaga sehingga perlu adanya perbaikan dengan peningkatan dalam aplikasi Tangerang Gemilang ini agar nantinya masyarakat dapat mengakses semua layanan dari rumah.

Dari keempat indikator tersebut menunjukkan hasil penelitian pada *e-government* layanan informasi publik melalui aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang pada indikator komunikasi dan disposisi sudah menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori indikator implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), sedangkan pada indikator sumberdaya dan stuktur birokrasi menunjukkan hasil yang belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan pada dua indikator tersebut, seperti peningkatan kualitas sumberdaya, pemenuhan kebutuhan internet dan teknologi digital serta peningkatan fitur layanan aplikasi Tangerang Gemilang agar semua layanan publik tercantum pada satu aplikasi dalam satu genggaman.

Keterbukaan informasi publik ini mengharuskan adanya pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung. Hal ini sejalan dengan tujuan informasi publik, yaitu, meminimalisir adanya kekuasaan yang disalahgunakan. Dasar pelaksanaan pemerintahan di negara demokratis adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai aturan yang mengusahakan munculnya keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan menjadikan adanya kemungkinan adanya akses kebebasan untuk setiap warga negara kepada beragam sumber informasi. Hal itu menjadikan warga negara semakin memiliki pengetahuan

yang jernih tentang semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Dengan pengetahuan itu, warga negara bisa ikut berperan serta dalam penentuan agenda publik. Sehingga peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui aplikasi Tangerang Gemilang ini sangat penting untuk di tingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi *E-Government* Pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang sesuai dengan indikator teori yang peneliti gunakan sebagai acuan untuk penelitian, menghasilkan kesimpulan yaitu dari keempat indikator tersebut menunjukkan hasil penelitian pada *e-government* layanan informasi publik melalui aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang pada indikator komunikasi dan disposisi sudah menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori indikator implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), sedangkan pada indikator sumberdaya dan stuktur birokrasi menunjukkan hasil yang belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan pada dua indikator tersebut, seperti peningkatan kualitas sumberdaya, pemenuhan kebutuhan internet dan teknologi digital serta peningkatan fitur layanan aplikasi Tangerang Gemilang agar semua layanan publik tercantum pada satu aplikasi dalam satu genggaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, D. K., Sondakh, M., & Koagouw, F. V. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi tentang penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4).
- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2), 151-163.
- Degedona, L. P. (2022). Implementasi Kinerja Uu No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi.
- Hendrizar (2016) Implementasi Kebijakan Layanan Informasi Publik Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 2829.
- Herlina, D. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jak Publik (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(1).
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140.
- Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1).
- Kurniawan, T. (2006). Hambatan dan Tantangan dalam mewujudkan Good Governance melalui penerapan e-Government di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi*, 194-197.

- M., Luthfi Munzir A. M. Burhani (2020) *Implementasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Berbasis Website Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kpu Kabupaten Pesisir Selatan*. Masters Thesis, Universitas Andalas.
- Megawati, L., Razak, A. R., & Parawu, H. E. (2021). Pengaruh Pemanfaatan E-Government Terhadap Disiplin Pegawai Di Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Toraja. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 2(6), 2085-2097.
- Mufassaroh, M. L. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
- Nur, M. (2021). Faktor Sukses Penerapan E-Government Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Di Kabupaten Gowa. *Skripsi. Makassar. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Nurazizah. 2020. Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nurrahman, A., Sabaruddin, S., & Salma, R. N. L. (2022). Optimalisasi Aplikasi Ppid Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 112-130.
- Salmah, R. N. L. (2022). *Optimalisasi Aplikasi Ppid Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Sari, N. (2019). Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Camat Lappariaja Kabupaten Bone. *Repository Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Sarinah, Nining. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng."
- Transmigrasi, P., & Annisa, C. (2011). Implementasi E-Government Melalui Bursa Kerja Online.
- Tsoraya, N. D., Khasanah, I. A., Prasadana, J. P., Perawati, S., Asbari, M., Noivitasari, D., ... & Asnaini, S. W. (2023). Pengenalan Aplikasi Pelayanan Publik Digital "Tangerang Gemilang". *Journal of Community Service and Engagement*, 3(1), 40-49.
- Wahyudi, R., Mursalin, A., & Sagala, I. (2020). *Implementasi E-Government Di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Widiani, Y. N., & Abdullah, A. (2018). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Government Melalui Aplikasi E-Filing Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 88-96.
- Yunas, N. S. (2020). Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 13-23.